

POLICY BRIEFS OF BATU LEPOQ VILLAGE, KARANGAN SUB-DISTRICT

**"Local Champion Empowerment Program in Non-state
Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in
Kutai Timur District, East Kalimantan Province**

KERJASAMA :

ASOSIASI PENDAMPING
PEREMPUAN USAHA
KECIL-MIKRO (ASPPUK)

BERSAMA

PKTL KLHK – Pemprov
Kalimantan Timur –
Pemkab Kutai Timur

**DI DUKUNG :
UNDP-GEF**

POLICY BRIEF

Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province KLHK-UNDP-GEF Project

“Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan”

**Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karang,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur**

Disusun oleh

ASPPUK
(ASOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL-MIKRO)

2022

RINGKASAN

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah pemekaran dari kab. Kutai di provinsi Kalimantan Timur berdasar No. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten. Kabupaten ini memiliki keluasan wilayah 35.747,50 Km², dengan batas wilayah; sebelah utara bertetangga dengan Kabupaten Berau, di timur dengan selat Makasar, di selatan berhimpitan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, dan sisi barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di desa sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender di dalam pengelolaansumber-sumber ekonomi semakin nyata, dibutuhkan. Untuk itu, pengelolaan sumber-sumber ekonomi desa mesti dibarengi pula dengan perbaikan pembangunan kesehatan ibu dan anak, pendidikan serta kondisi sosial kelompok perempuan dan anak khususnya, serta masyarakat umumnya. Dimana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dapat memberikankesejahteraan dan terjadi perbaikan serta peningkatan pendapatan keluarga serta perbaikan posisi dan kondisi kepemimpinan perempuan di akar rumput, terutama didalam pengelolaan ekonomi lokal.

Suku asli masyarakat desa Batu Lepoq adalah Dayak Basep. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam (SDA) desa. Diantaranya pertanian padi ladang, sayur (terong, ubi, jahe, kunyit, ketimun) dan kehutanan sebagai bahan kerajinan tangan rotan, bahan jamu, gula aren, serta pengelolaan wisata air panas dan air terjun. Terbatasnya dukungan Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan perempuan dikarenakan alokasi dana desa berfokus pada pembangunan infrastruktur. Rendahnya pendidikan perempuan dan anak muda membuat kebanyakan perempuan dan anak muda buta huruf.

PENDAHULUAN

Salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah ketidaksetaraan gender dan sosial yang menyebabkan munculnya eksklusi sosial dan gender. Manfaat dari program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum dapat dinikmati secara adil dan setara, khususnya oleh perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Oleh karenanya, upaya inklusi gender menjadi sangat penting untuk memastikan kesuksesan suatu program.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, mendorong pengintegrasian perspektif

gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender agar menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam upaya meningkatkan pembangunan lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di setiap level pembangunan mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Melalui pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) melaksanakan Proyek Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan di Kalimantan (Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan) atau KalFor Project, dimana salah satu lokasi yang menjadi target adalah Desa Batu Lepoq, Provinsi Kalimantan Timur.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan salah satu mitra penerima hibah proyek berjudul Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province bertujuan untuk menciptakan para local champion khususnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan responsive gender, inovatif, kreatif dan transformative di tingkat desa melalui pengelolaan sumber daya ekonomi alternatif untuk keberlanjutan hidup.

Melalui Proyek ini diharapkan para Local Champion atau kader - kader penggerak perubahan sosial ekonomi di tingkat desa aktif memimpin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi desa secara berkelanjutan dan turut mendukung tujuan besar proyek untuk membangun penguatan perencanaan pengelolaan hutan dalam menyelamatkan dan menjaga hutan (di luar kawasan hutan) beserta jasa ekosistem dan keanekaragamannya yang bernilai tinggi, pada suatu kesatuan lanskap dari dataran rendah sampai pegunungan di pulau Kalimantan.

Manfaat proyek ini diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan dalam perkebunan untuk mendukung secara global pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan yang memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati serta mitigasi perubahan iklim.

TUJUAN

Policy Brief ini merupakan dokumen hasil analisis terhadap isu strategis dan kebijakan yang dikembangkan dari hasil temuan di lapangan melalui kegiatan assessment, pendampingan, pelatihan, lokakarya/FGD/ diskusi-diskusi yang dilakukan ASPPUK selama menjalankan proyek. Tujuan dari pembuatan *policy brief* ini adalah :

1. Untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) kepada para stakeholder yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan/ membuat keputusan
2. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama kepada pemerintah desa/kelurahan dan parapemangku kepentingan lainnya terhadap isu-isu strategis yang ada
3. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan para Pemangku Kebijakan terkait isu-isu yang berkembang di Desa Batu Lepoq

ASPPUK dalam mendukung Pemberdayaan Local Champion di Areal Sekitar Hutan

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan organisasi jaringan di tingkat nasional yang memiliki 44 NGO anggota, berada di 20 provinsi, memiliki 77 Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro (JARPUK) yang berada di level kota/kabupaten, memiliki 1528 Kelompok Perempuan Usaha Kecil Mikro (KPUK) ditingkat desa, mendampingi kurang lebih 2 juta perempuan usaha kecil mikro dan memiliki 33 Lembaga Keuangan Perempuan (LKP). ASPPUK memiliki visi terwujudnya perempuan usahakecil mikro yang kuat, mandiri, setara dan berkeadilan gender serta inklusi.

ASPPUK sebagai organisasi yang focus pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, memiliki keahlian, pengalaman dan modalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis usaha melalui pendekatan :

1. Pengintegrasian nilai-nilai 3 P (people, planet, profit) dalam pengembangan bisnis, dimana pengembangan model bisnis yang dikembangkan tidak saja mengejar keuntungan (profit) semata namun juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Planet) dan menghormati hak asasi manusia (people), dimana bisnis yang dijalankan harus dapat memenuhi hak-hak pekerja dan tidak melanggar HAM.
2. Pengintegrasian bisnis responsive gender, dimana bisnis yang dijalankan harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam rantai nilai usaha, mengembangkan kebijakan bisnis yang ramah perempuan dan anak, mengembangkan SOP anti kekerasan seksual ketika menjalankan bisnis, menerapkan pembagian peran adil gender, memberdayakan kaum perempuan yang hidup di sekitar area usaha atau bisnis yang dijalankan dan lain-lain

3. Pendekatan bisnis komunitas atau bisnis berbasis sumber daya local, dimana pendekatan ini dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada komunitas Bahan baku produk yang dikembangkan diambil dari keunggulan dan ciri khas yang ada di daerah tersebut, tidak mendatangkan bahan baku dari luar, namun memanfaatkan sumber daya local secara berkelanjutan, arif dan bijaksana.

ASPPUK telah memberdayakan Local Champion dan masyarakat khususnya perempuan dan kaum mudadi lokasi sasaran proyek melalui serangkaian kegiatan seperti melakukan assessment awal di setiap desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, melakukan ToT Kepemimpinan Sosial Ekonomi Perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Kepemimpinan Sosial Ekonomi di tingkat desa, melakukan pendampingan yang terdiri dari bisnis mentoring dan coaching, diskusi rutin, pelatihan pemasaran, pelatihan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam, bantuan bibit usaha, pendampingan untuk pengurusan NIB, HAKI, PIRT dan membangun kolaborasi dengan para stake holder.

Pengembangan Bisnis/Usaha Komunitas di Desa Batu Lepoq

Selama pendampingan (Technical Assistance), ASPPUK melakukan mentoring dan coaching bisnis dengan mengembangkan bisnis/usaha komunitas untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari penduduk di komunitas pedesaan/pedalaman (termasuk masyarakat/suku asli) dengan cara meningkatkan pendapatan dan kemampuan komunitas melalui proses produksi dan pemasaran yang adil dari produk-produk unggulan desa/tempat mereka sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada di wilayahnya.

Pengembangan usaha komunitas ini berdasarkan atas sumberdaya / Potensi yang ada di wilayah setempat, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi mata pencaharian alternatif maupun eksisting untuk masyarakat desa. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya atas kekayaan alam namun, sumberdaya manusia pun menjadi perhitungan utama sebagai pengelola yang bijak untuk mengelola sumberdaya / potensi yang ada tersebut.

Produk yang didorong sebagai unggulan atau identitas dari Local Champion dalam menjalankan dan mengembangkan Usaha Komunitas berdasarkan mapping dan perengkingan sumberdaya / potensi local yang ada di desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, dimana produk unggulan dari Desa Batu Lepoq adalah abon ikan dan jamu herbal khas dayak.

Usaha Komunitas yang dikembangkan oleh penerima manfaat program memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan social ekonomi serta lingkungan, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh dari usaha komunitas di Desa Batu Lepoq yang dibangun oleh tim Local Champion berkomitmen menyumbangkan 5% dari keuntungan yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap persoalan sampah yang ada di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan berkomitmen mendukung program/kegiatan untuk membangun dan melestarikan wilayah hutan APL

Mengapa ini Penting ?

Masih terjadi kesenjangan gender terhadap perempuan dan anak muda yang hidup di area sekitar hutan, diantaranya minimnya keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi yang ada di desa, terbatasnya akses dan control perempuan dan anak muda terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi, minimnya kapasitas dan keterampilan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis usaha, kepemimpinan yang lemah, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sehingga perempuan dan anak muda tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, masih adanya hambatan-hambatan social budaya yang menyulitkan perempuan maupun anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di tingkat desa.

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan.

Kesenjangan Gender akan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, memperburuk ketimpangan pembangunan, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan menghambat pencapaiantujuan SDGs, yaitu tujuan ke 1; Mengakhiri kemiskinan, tujuan ke 5; Mencapai kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan tujuan ke 8; Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

Perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Prinsip SDGs “no one left behind” menunjuk pada kewajibannegara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan dalam pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global pembangunan yang disepakati seluruh anggota PBB. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen kuat

dalam pelaksanaan SDGs yang diturunkan dalam 17 Tujuan serta 169 Target. Yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam menterjemahkan komitmen ini adalah dengan integrasi yang erat dengan program Nawa Citapemerintah hingga tertuang secara konkrit dalam Rencana Kerja Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi wujud komitmen tersebut.

Isu – isu gender dan kepemimpinan perempuan untuk mendukung SDGs

Kurangnya akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi di desa

Dalam pengelolaan sumberdaya alam perempuan dan anak muda memiliki akses di aktifitas pertanian dan perikanan namun, laki - laki yang mengontrol seperti keputusan kemana akan menjual hasil. Hal ini berdampak pada streatip pendapatan perempuan adalah pendapatan tambahan keluarga. Anak muda dapat mengakses sumber daya alam namun masih di anggap membantu oleh orang tua akibatnya anak muda kurang inovasi dan merasa tidak percaya diri.

Selain itu, transformasi digital turut mempengaruhi anak muda, dimana anak muda mengalokasikan waktunya pada aktifitas konsumtif seperti bermain game dan sosial media.

Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi perempuan

Alokasi dana desa yang masih berfokus pada infrastruktur menyampingkan pemberdayaan perempuan dan anak muda. Selain itu, jauhnya jarak desa dari kota membuat terbatas informasi untuk peningkatan kapasitas perempuan dan tingginya buta huruf khususnya perempuan membuat perempuan kurang melakukan aktifitas produktif.

Adapun pelatihan yang pernah diselenggarakan hanya sebatas melatih teknis pembuatan produk yang tidak relevan dengan ketersediaan bahan baku di desa. Kekayaan sumber daya hutan di Batu Lepoq belum dimanfaatkan dengan baik karena banyak produk hutan yang dijual masih dalam bentuk bahan mentah belum di olah menjadi produk turunan yang bernilai tambah. Transformasi digital juga mempengaruhi kurangnya minat anak muda untuk menerima warisan pengetahuan lokal seperti kerajinan dari rotan dan gula aren.

Lemahnya jaringan pasar

Produk dari kebun dan hutan dijual berupa bahan mentah dari petani dan nelayan kepada penadah. Penadah memegang peran penting dalam penentuan harga bahan mentah. Daya tawar rendah dan jarak yang jauh dari desa serta sulitnya infrastruktur menjadikan penadah sebagai satu-satunya pembeli dalam partai besar. Hasil pertanian, hutan dan perikanan yang masih mentah dihargai rendah karena belum diolah secara inovatif menjadi aneka produk turunan bernilai tambah.

Lemahnya kapasitas perempuan dalam manajemen keuangan dan pencatatan keuangan

Usaha yang dijalankan perempuan belum menerapkan catatan keuangan sederhana dan belum di pisahkan catatan keuangan usaha dan catatan keuangan rumah tangga yang membuat perempuan kesulitan untuk melihat rasio keuntungan usaha dan modal usaha. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya usaha perempuan.

Norma-norma sosial gender yang tidak adil

Dalam pembagian peran gender di rumah tangga di dominasi perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan mengambil air. Sementara laki-laki mengerjakan tugas di luar rumah dan beristirahat saat pulang ke rumah. Laki-laki dianggap masyarakat berperan penting dalam usaha produktif seperti mencari nafkah utama keluarga.

Kegiatan ibu dan anak perempuan yang menghasilkan uang, dianggap sebagai tambahan perekonomian keluarga. Meskipun perempuan juga memancing ikan atau memetik sayuran untuk dikonsumsi di rumah dan seminggu sekali mencari cabai di perkebunan sawit. Tetap saja penghasilan perempuan sebagai tambahan keluarga.

Pergeseran mata pencaharian utama pemuda dari petani dan nelayan menjadi karyawan perusahaan

Pergeseran mata pencaharian dikarenakan pemuda memilih bekerja di perusahaan di sektor pertambangan, kelapa sawit dan kayu menyebabkan penurunan minat pemuda menjadi nelayan dan petani yang berdampak negative pada pengetahuan lokal dan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Desa Batu Lepoq

Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Desa Batu Lepoq, antara lain :

1. Memfasilitasi legalitas kelompok usaha local champion agar berbadan hukum.
2. Alokasi dana desa dan penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak muda seperti pelatihan dan pendampingan.
3. Mendorong perempuan dan anak muda untuk mengembangkan potensi dan minatnya mewarisi pengetahuan lokal yang bernilai sosial, lingkungan, ekonomi dan budaya untuk menghindari kepunahan.
4. Memberikan peningkatan kapasitas perempuan untuk melihat peluang pasar dan rantai nilai pasar.
5. kolaborasi multi-pihak secara masif dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
6. Di tingkat desa perlunya representative pemuda dalam rapat – rapat pengambilan keputusan khususnya perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan desa

7. Membuka Akses pemasaran produk-produk komunitas melalui event-event desa/kecamatan/kabupaten seperti acara bazar produk-produk komunitas, aksi bersih kampung yang dirangkaikan dengan pameran produk komunitas dan lainnya.